

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM  
DANA DESA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL  
*INTERVENING***

(Studi Kasus Di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah)

Oleh  
**Pandi Afandi**  
STIE AMA Salatiga

***Abstract***

*Observation represent the important variable in ascertaining what planning have been executed, with the observation of hence will have an in with to arrange the good governance which is on finally support the its reached program efficacy. Just as in fund management of countryside 9 village in District of Bancak of Sub-Province of Semarang of Central Java in supporting efficacy and its village progress. Intention of this research is to know the influence of variable observation to arranging good governance, influence of good governance to efficacy program of village fund, and both influence of the variable to efficacy of program of village fund, and also what good governance become the variable intervening for the relation of observation with the efficacy of program of village fund.*

*Its result indicate that the observation have an effect on positive significant to good governance and good governance have an effect on positive signifikan to efficacy of program of village fund, but observation have an effect on the negative significant to efficacy of program of village fund and also good governance become the connective variable intervening of variable observation with the efficacy of program of village fund.*

*Increase of active role lead the village and BPD in observing the way execution of program of village fund., process the observation of execution of program of village fund having the character of more persuasive. ( persuasive control) and active participation of village society represent the matter suggested from this research result.*

***Keywords: Observation, Good Governance and Efficacy of village fund program***

**PENDAHULUAN**

Memberdayakan masyarakat desa menjadi basis kekuatan yang diandalkan untuk tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mendukung keberhasilan tersebut diperlukan Pemerintah yang bersih dan konsistensi pada semua lini, sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai keberhasilan program-program dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah serta pemerintah desa. Pendanaan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), bahwa sumber dana desa diperoleh melalui alokasi dana desa

(ADD) minimal 10 persen dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota, dari jumlah tersebut penggunaannya 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat , sisanya 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Selanjutnya jumlah ADD yang berkisar puluhan sampai ratusan juta rupiah, sejak digulirkannya dana desa kini mencapai jumlah fantastis untuk tiap desanya sesuai dengan ukuran desa dengan menerima dana dengan angka milyar-an rupiah per desa dengan jumlah desa sebanyak 73.000 desa dan 8.000 kelurahan.

Kepala desa bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) hingga rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang dalam praktek pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengawasan sangatlah diperlukan guna memastikan program dapat dijalankan sesuai dengan rencana, untuk itu dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sesuai dengan Teori *agency* dalam praktiknya telah terjadi hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents* (Jansen dan Smith,1984), *Prinsipal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent, agar melakukan kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam organisasi sektor public yang dimaksud principal adalah *rakyat* dan *agen* adalah pemerintah dalam hal ini kepala desa dan aparat lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara *teori agensi* dan akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi kewajiban agen/dalam hal ini kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas menjadi kata kunci bagi tata kelola pemerintah daerah (desa) yang *good governance*.

Habibie (2013) bahwa pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance* pada Pemda Kota Solok demikian pula dengan Djiloy (2016) membuktikan bahwa variable pengawasan intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat SKPD Pemda Sigi Propinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian lain oleh Kuncoro (2018), di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus diperoleh hasil bahwa *good governance* mampu menjadi variable contingency dalam menciptakan pemerintah yang bersih diperlukan pengawasan sehingga mampu menunjang keberhasilan program dana desa. Dari hasil penelitian tersebut merekomendasikan pentingnya memaksimalkan pengawasan agar berkontribusi untuk tercapainya keberhasilan program dana desa.

Dari hasil penelitian tersebut merekomendasikan pula akan pentingnya pengelolaan dana sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sehingga mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan program dana desa. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana desa akan memaksimalkan pengawasan terhadap dana desa dalam mewujudkan tercapainya *good governance*, sehingga tujuan pemerintah desa dalam mewujudkan keberhasilan dana desa yang tepat pada sasaran.

Dengan latar belakang tersebut melalui penelitian ini peneliti menindaklanjutinya dengan penelitian yang dilaksanakan dalam ruang lingkup wilayah desa dalam satu kecamatan, yaitu kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Dalam satu kecamatan terdiri dari sembilan desa yang meliputi Desa Bancak, Desa Wonokerto, Desa Jlumpang, Desa Bantal, Desa Rejosari, Desa Plumutan, Desa Lembu, Desa Pucung dan Desa Boto (Monografi Kecamatan Bancak 2018). Dipilihnya desa di Kecamatan Bancak tersebut karena telah menerima dana desa sejak digulirkannya dana desa, Kepala desa dan badan pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan program dana desa untuk terwujudnya *good governance*, dengan adanya *good goveranance* diharapkan pelaksanaan program dana desa lebih berhasil dan tepat sasaran, untuk penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Jawa Tengah Indonesia).

### **Rumusan Masalah**

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam manajemen, sekaligus memastikan apakah rencana yang telah disusun dapat direalisasikan. Dalam pengawasan dana desa dibuthkan peran dari Badan Pengawas Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat dan juga kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa

terutama dalam menggunakan dana desa. Pengawasan yang dilakukan akan mendukung tata kelola pemerintah (*good governance*) yang dijalankan dalam mendukung keberhasilan program dana desa, sehingga apakah pengawasan akan langsung berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa ataukah pengawasan harus melalui *good governance* terlebih dahulu dalam mewujudkan keberhasilan program dana desa, sehingga dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pengawasan dana desa terhadap *good governance*?
2. Apakah ada pengaruh pengawasan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat?
3. Apakah ada pengaruh *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat?
4. Apakah ada pengaruh pengawasan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat
5. Apakah ada pengaruh pengawasan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat dengan *good governance* sebagai *variable intervening*?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh *variable* pengawasan dana desa dan pengaruhnya terhadap keberhasilan program dana melalui *variable good governance*. Hasil penelitian ini diharapkan member manfaat pada pemangku kepentingan dana desa khususnya desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang serta berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan amanat Permendagri 113 Tahun 2014.

### **PAPARAN TEORITIS**

#### **a. Teori Agency**

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain dalam hal ini adalah agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jansen dan Smith, 1984). Dalam praktiknya pada organisasi *sector public (governance)*, yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agen* adalah pemerintah

daerah yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh kepala desa dan aparat desa lainnya.

#### **b. Good Governance**

*Good governance* dapat diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka ( Suhendar:2016 ). Prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik mengutip dari *Word Bank* mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* yaitu terbentuknya masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang tanggung jawab, birokrasi yang professional dan taat hukum. UNDP memberikan pandangan tentang karakteristik *good governance* meliputi *akuntabilitas public*, *transparansi*, dan *rule of law* (tegaknya supermasi hukum). *Asian Development Bank* menegaskan tentang konsensus *good governance* yang terdiri atas *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*, sehingga dalam penelitian ini *good governance* yang dapat dijadikan indicator meliputi *akuntabilitas publik*, *transparansi*, *rule of law* dan *partisipasi* masyarakat.

#### **c. Pengawasan**

*Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Schermerhorn, 2002: 12). The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. (Stoner, Freeman & Gilbert, 2005: 114).*

Pengawasan lebih memberikan nuansa pada pengukuran kinerja serta pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil. Selain itu pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Abdullah ( 2005:105) pengawasan dapat berupa pengawasan langsung, tidak langsung, preventif dan repressif. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa pada objek secara langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana, pengawasan preventif dilakukan dengan *pre-audit*

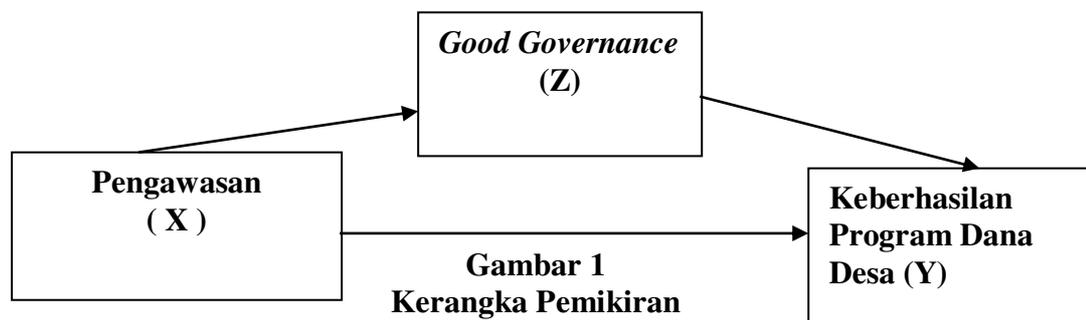
sebelum pekerjaan dilakukan dan pengawasan represif dilakukan dengan *post audit* terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat. men yang merupakan bentuk pemeriksaan atau kontrol dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Pengawasan melakukan proses agar tercapai apa yang direncanakan.

#### d. Keberhasilan Program Dana Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan (Kila: 2017). Pemberdayaan merujuk pula pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, memiliki kekuasaan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun social. Selain itu pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga intinya meliputi tiga hal yaitu: *pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian.*

#### Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu tersebut dengan menggunakan causalitas ketiga variable yang terdiri dari *pengawasan, good governance, dan keberhasilan program dana desa* di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, sehingga dapat disusun melalui kerangka pemikiran di bawah ini.



## **Hipotesis Penelitian**

Penelitian dilakukan di 9 Desa dalam satu kecamatan yaitu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan objek hanya di satu desa dengan kombinasi variable yang berbeda pula, yaitu variabel pengawasan, *good governance* dan keberhasilan program dana desa sehingga berdasar kerangka pemikiran tersebut di atas dapat disusun hipotesisnya sebagai berikut :

1. Ada pengaruh signifikan pengawasan dana desa terhadap *good governance*
2. Ada pengaruh signifikan pengawasan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat
3. Ada pengaruh signifikan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat
4. Ada pengaruh signifikan pengawasan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat
5. Ada pengaruh signifikan pengawasan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat dengan *good governance* sebagai variable intervening

## **METODE PENELITIAN**

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bertipe "*explanatory research*", yaitu menjelaskan hubungan antar variable satu dengan yang lain, menentukan ada tidaknya pengaruh antar variable (Sugiyono:2004:50). Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Lokasi penelitian yang dipilihnya adalah 9 desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, dipilihnya desa tersebut karena telah menerima program dana desa Sebagai responden adalah kepala desa dan perangkat desa, Ketua dan perwakilan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas disajikan diperoleh dari perhitungan *Corrected Item-Total Correlation* dalam table di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Uji Validitas**

Variabel	r-hitung	r-tabel	Hasil
<b>Pengawasan Dana Desa (X)</b>			
1. Q1	0.539	0.304	VALID
2. Q2	0.487		VALID
3. Q3	0.583		VALID
4. Q4	0.444		VALID
<b>Good Governance (Z)</b>			
1. Q1	0.492	0.304	VALID
2. Q2	0.509		VALID
3. Q3	0.440		VALID
4. Q4	0.318		VALID
<b>Keberhasilan Dana Desa (Y)</b>			
1. Q1	0.481	0.304	VALID
2. Q2	0.542		VALID
3. Q3	0.436		VALID

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian menunjukkan hasil yang *valid*, yaitu ditunjukkan bahwa semua hasil r-hitung lebih besar dari r-tabel = 0.304 ( $df=42-2$ ,  $\alpha=0.05$ ) Hal ini menunjukkan bahwa semua jawaban dari responden dari desetiap variable sesuai dengan indicator empiriknya.

### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan oleh table di bawah ini.

**Tabel Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Alpha Pembeding	Hasil
<b>Pengawasan Dana Desa (X)</b>	0.722	0.6	Reliable
<b>Good Governance (Z)</b>	0.652	0.6	Reliable
<b>Keberhasilan Dana Desa (Y)</b>	0.667	0.6	Reliable

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variable menunjukkan *Cronbach's Alpha*, asing-masing 0,722 untuk variable pengawasan dana desa, 0.652 untuk variable *good governance* dan 0.667, untuk variable keberhasilan

dana desa, kesemuanya menunjukkan hasil yang lebih besar dari alpha pembandingan sebesar 0.6, (Nunnally dalam Ghozali, 2001 : 42), sehingga semua variable dinyatakan *reliable* dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

### Hasil Uji Hipotesis

Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan *regresi linier berganda* dan untuk mengetahui hubungan antar variable digunakan *path analysis* (analisis jalur),

#### a. Pengaruh Pengawasan Dana Desa Terhadap *Good Governance*

Pengaruh pengawasan dana desa terhadap *good governance* ditunjukkan oleh hasil output SPSS di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Pengawasan Program Dana Desa dan *Good Governance***  
***Coefficients<sup>a</sup>***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.459	2.122		4.929	.000
PENGAWASAN (X)	.355	.168	.317	2.114	.041

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE (Z)

Tabel tersebut di atas menunjukkan digunakan untuk menyusun persamaan regresi guna mengetahui koefisien pengaruh pengawasan terhadap *good governance* dan untuk mengetahui besarnya *R square* ( $r^2$ ) guna mengetahui besaran angka *variance* yang tidak dapat dijelaskan oleh variable pengawasan dapat dilihat dari output, *model summary* di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Predictors Variabel Pengawasan**  
***Model Summary***

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.317 <sup>a</sup>	.101	.078	1.188

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN (X)

Hasil persamaan yang dapat disusun dari out put tersebut adalah:

$$Z = b_2X + e_1, \quad e_1 = e_2 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$Z = 0.317 X + \sqrt{1 - 0.101^2}$$

$$Z = 0.317 X + 0.948$$

Besarnya koefisien regresi pengawasan terhadap *good governance* 0.317 satuan dengan besaran nilai *variance* yang tidak dapat dijelaskan oleh variable pengawasan sebesar 0.948 satuan, maka variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap *good governance* sebesar 0.317 satuan. Hasil uji hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan terhadap *good governance* yang ditunjukkan oleh  $sign = 0.041$ , maka berada di bawah  $\alpha = 0.05$ .

Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat dan BPD dalam melaksanakan program dana desa melalui pengawasan rutin, pemantauan atas laporan, pemeriksaan di awal pelaksanaan dan hasil akhir pelaksanaan yang berjalan secara intensif secara signifikan meningkatkan kualitas tatakelola dana desa (*good governance*) yang dapat dijelaskan dari tingkat *akuntabilitas public*, *transparansi* (keterbukaan) dalam pengelolaan, meningkatnya partisipasi masyarakat serta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada (*rule of law*).

#### b. Pengaruh Pengawasan Dana Desa Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa

Pengaruh pengawasan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa ditunjukkan oleh hasil output SPSS di bawah ini.

**Tabel 4**  
**Output Untuk Pengawasan, *Good Governance* & Keberhasilan**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.137	1.919		4.762	.000
	PENGAWASAN (X)	-.398	.126	-.429	-3.151	.003
	GOOD GOVERNANCE (Z)	.470	.113	.567	4.167	.000

a. Dependent Variable: KEBERHASILAN PROGRAM DANA DESA(Y)

Untuk mengetahui besaran angka *variance* yang tidak dapat dijelaskan oleh variable besarnya pengaruh variable pengawasan dan *good governance* terhadap keberhasilan pelaksanaan program dana desa dapat dilihat dari output, *model summary* di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Predictors *Good Governance* dan Pengawasan**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.318	.847

a. Predictors: (Constant), GOOD GOVERNANCE (Z), PENGAWASAN (X)

Persamaan regresi yang dapat disusun dari output SPSS tersebut pada table tersebut dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = - 0.429 X + 0.567 Z + \sqrt{1 - 0.351^2}$$

$$Y = - 0.429 X + 0.567 Z + 0.936$$

Besarnya koefisien regresi pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan program dana desa - 0.429 satuan, pengaruh negative menunjukkan bahwa jika pengawasan terlalu ketat maka keberhasilan program dana desa justru akan menurun 0.429 satuan dan pengaruh *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa positif 0.567 satuan artinya jika tata kelola (*good governance*) semakin baik maka akan kinerja (output) pelaksanaan program dana desa semakin baik. Besaran nilai *variance* keberhasilan program dana desa yang tidak dapat dijelaskan oleh variable pengawasan dan *good governance* sebesar 0.936 satuan.

Hasil uji hipotesis terdapat pengaruh signifikan variable pengawasan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0.003 di bawah  $\alpha = 0,05$ . Hasil pengaruh signifikan dan negatif, artinya jika pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa diperketat, memberi tekanan pada keberhasilan pelaksanaan program dana desa berpengaruh terhadap menurunnya keberhasilan program dana desa. Sebaliknya jika pengawasan terhadap pengelolaan dana desa diperlonggar maka akan meningkatkan keberhasilan program dana desa.

**c. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa**

Hasil uji hipotesis pengaruh *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa seperti terlihat dalam table diperoleh sig = 0.00, di bawah nilai  $\alpha = 0.05$ , sehingga terdapat pengaruh signifikan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa. Hasil uji hipotesis positif dan

signifikan artinya jika program dana desa dikelola dengan penuh tanggung jawab (*akuntabel*), penuh keterbukaan (*transparan*), melibatkan warga (*partisipatif*) dan taat pada ketentuan aturan (*rule of law*) maka akan meningkatkan keberhasilan program dana desa.

**d. Pengaruh Pengawasan Dana Desa dan *Good Governance* terhadap keberhasilan program dana desa**

Hasil uji hipotesis pengaruh pengawasan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dapat dilihat dari tabel output ANOVA dibawah ini.

**Tabel 6**  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15.139	2	7.570	10.542	.000 <sup>a</sup>
Residual	28.004	39	.718		
Total	43.143	41			

a. Predictors: (Constant), GOOD GOVERNANCE (Z), PENGAWASAN (X)

b. Dependent Variable: KEBERHASILAN PROGRAM DANA DESA(Y)

Dari output ANOVA tersebut diperoleh nilai sig=0.000, dibawah nilai  $\alpha=0.05$ , sehingga pengawasan dan *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa,

Keberhasilan program dana desa sangat ditentukan oleh pengawasan pengelolaan program dana desa dan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga variable pengawasan yang dimulai dari pelaksanaan program dana desa, pelaporan program dana desa dan pemeriksaan hasil pelaksanaan program dana desa yang didukung oleh akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan *rule of law* mendukung keberhasilan program dana desa dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 35.1 persen.

**e. Pengaruh Pengawasan Dana Desa Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan *Good Governance* Sebagai *Variable Intervening***

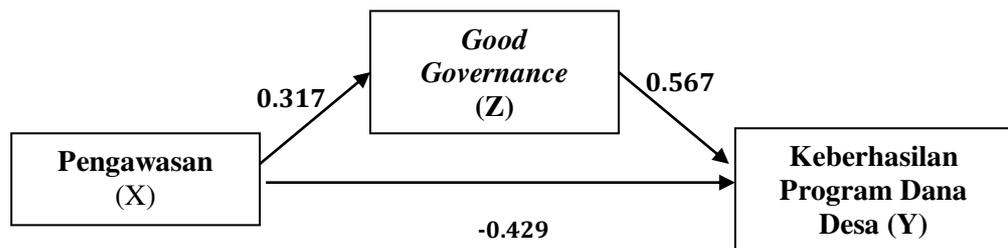
Besarnya pengaruh tidak langsung, yaitu antar variable pengawasan terhadap keberhasilan Program Dana Desa melalui *Good Governance* sebagai variabel *intervening*, dapat dijelaskan dengan gambar

*path analysis* yang disusun dari perolehan dua persamaan regresi sebelumnya yaitu:

$$Z = 0.317 X + 0.948, \text{ hasil persamaan regresi 1}$$

$$Y = - 0.429 X + 0.567 Z + 0.936, \text{ hasil persamaan regresi 2}$$

Hasil angka koefisien regresi tersebut dapat digunakan untuk mengisi gambar *path* di bawah ini.



#### Analisis Jalur (*Path Analysis*) Uji Hipotesis 5

Keterangan :

$b_1=p_1$ =Koefisien Regresi Pengawasan Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa , jalur/*path* 1= -0.429

$b_2=p_2$ =Koefisien Regresi Pengawasan terhadap *Good Governance* jalur/*path* 2 = 0.317

$b_3=p_3$ =Koefisien Regresi *Good Governance* Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa *path* 3= 0.567

Untuk mengetahui apakah pengawasan berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa melalui *good governance* sebagai *variable intervening*, maka diperoleh hasil  $p_2 \times p_3 = 0.317 \times 0.567 = 0.1797$  dibandingkan dengan nilai  $p_1$  sebesar -0.429. Dari hasil tersebut maka diperoleh hasil kali *path* 1 dengan *path* 2 lebih besar dari hubungan pengaruh langsung pengawasan terhadap keberhasilan program dana desa sebesar - 0.42. sehingga *variable good governance* menjadi *variable intervening* yang menghubungkan pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan program dana desa, artinya terdapat pengaruh pengawasan terhadap program dana desa melalui *good governance* sebagai *variable intervening*.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan program dana desa di 9 desa kecamatan Bancak kabupaten Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan terhadap *good governance* yang ditunjukkan oleh  $\text{sign} = 0.041$ , maka berada di bawah  $\alpha = 0.05$ , semakin ditingkatkan kualitas pengawasan terkait dengan, rutinitas, pelaporan hasil, perlunya pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir maka tata kelola (*good governance*) dana desa yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan *rule of law* semakin baik.
2. Hasil uji hipotesis kedua terdapat pengaruh signifikan variable pengawasan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0.003 di bawah  $\alpha = 0.05$ , Hasil pengaruhnya signifikan dan negatif, artinya jika pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa diperketat justru memberi tekanan pada keberhasilan pelaksanaan program dana desa terjadi penurunan keberhasilan program dana desa. Sebaliknya jika pengawasan terhadap pengelolaan dana desa diperlonggar maka akan meningkatkan keberhasilan program dana desa.
3. Hasil uji hipotesis ketiga diperoleh angka 0.00, di bawah nilai  $\alpha = 0.05$ , sehingga terdapat pengaruh signifikan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa, artinya semakin meningkat kualitas akuntabilitas public, transparansi, partisipasi dan *rule of law*, semakin meningkatkan keberhasilan program dana desa, sebaliknya semakin menurun kualitas tata kelolanya maka akan semakin menurun keberhasilan program dana desa yang meliputi perkembangan desa, pengembangan potensi desa dan kemandirian desa.
4. Dari output ANOVA tersebut diperoleh nilai  $\text{sig} = 0.000$ , dibawah nilai  $\alpha = 0.05$ , sehingga pengawasan dan *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, sehingga variable pengawasan yang dimulai dari pelaksanaan program dana desa, pelaporan program dana desa dan pemeriksaan hasil pelaksanaan program dana desa yang didukung oleh *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi,

partisipatif dan *rule of law* mendukung keberhasilan program dana desa dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 35.1 persen.

5. Terdapat pengaruh pengawasan terhadap program dana desa melalui *good governance* sebagai *variable intervening*, artinya pengawasan program dana desa akan mendukung keberhasilan program dana desa harus melalui tata kelola (*good governance*) yang baik.

## **SARAN**

Dari hasil kesimpulan tersebut, maka terkait dengan tata kelola program dana desa di 9 Desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, disarankan sebagai berikut :

1. Pengawasan terbukti berpengaruh positif terhadap *good governance* , dan *good governance* juga berpengaruh positif terhadap keberhasilan program dana desa, serta dibuktikan pula bahwa pengawasan dan *good governance* berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan program dana desa maka diperlukan peningkatan peran yang lebih aktif lagi kepala desa dan BPD dalam mengawasi jalannya pelaksanaan program dana desa.
2. Pengawasan terbukti berpengaruh negatif terhadap keberhasilan program dana desa, artinya pengawasan yang terlalu ketat menyebabkan kinerja pengelolaan dana justru menurun, sehingga disarankan adanya proses pengawasan pelaksanaan program dana desa yang bersifat lebih persuasive. (*persuasive control*).
3. Pengawasan terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa dengan terlebih dahulu melalui *good governance* sebagai *variable intervening*, hal ini menegaskan bahwa tata kelola dana desa berjalan dengan baik harus melibatkan peran aktif masyarakat desa.

## **Implikasi**

1. *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program dana desa, ini sejalan sejalan dengan temuan Priyanka (2013) '*that governance ratings have positive and significant impact on corporate financial performance*. Seperti halnya Fadilah,(2013) bahwa '*implementation of good governance contribute to or influence for 47.5% of the performance of the*

*organization*. Sedangkan pengaruh langsung pengawasan terhadap keberhasilan program desa signifikan negative tidak sejalan dengan penelitian Lestari, (2015) bahwa *control internal positive significant effect on the performance of the organization*. Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap good governance sejalan dengan penelitian Leny (2014) *internal controlling have significancy effect to the implementation of good government governance*.

2. *Good governance* sebagai variabel *intervening* yang menghubungkan variabel pengawasan dengan keberhasilan program dana desa merupakan temuan baru yang didapatkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suhendar, *Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip good governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator*, Jurnal JRKA, Universitas Kuningan, 2016.
- Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, MediaKom, Yogyakarta, 2009.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, BP Undip, 2001
- Hisbul Manto, Abdul Qodir Djaelani, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Riset Manajemen, Unisma Malang, 2017.
- H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Jones, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kartono, Kartini. 2002. *Psikologi Umum*. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia
- Kristina Korniti Kila, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara Vol 5, Universitas Mulawarman, 2017.
- Kuncoro, Amin, *Pengawasan Berkontribusi Bagi Keberhasilan Program Dana Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Jawa Tengah Indonesia Dengan Menggunakan Good Governance Sebagai Variabel Contingency*. 2018
- Muhammad Ismail, dkk, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XIX, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, 2002

- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (add) di desa panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo. ISSN 2303-341X Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa.*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 75-88.
- Riduwan, Engkos AK, *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Schermerhorn, (2002) *Pengawasan dalam Manajemen*, Jakarta : Bina Aksara.
- Stoner, Freeman dan Gilbert (1995). *Pengantar Bisnis. GRAHA ILMU.* Yogyakarta.
- Stoner, S., James A.F., Edward Freeman and Gilbert, Daniel. 2005. *Management*, New Jersey: Prentice Hall inc.
- Tangkumahat, 2017. Dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan Dan ekonomi di kecamatan pineleng kabupaten minahasa. *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 - 342
- Sri Mulyani, *Penjelasan Tentang Transfer Daerah dan Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Informasi APBN 2018.*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alafabeta, Bandung, 2006.
- Supramono dan Sugiarto, *Statistika*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2003.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965, *Tentang Desa Praja.*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa.*
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. “*Governance for sustainable human development*”.